



**PENETAPAN**  
**Nomor 127/Pdt.P/2019/PA TALU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Jontar Bin Adra, tempat dan tanggal lahir Lubuk Gobing, 05 April 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jorong Lubuk Gobing, Nagaro Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat; sebagai Pemohon I

Yusniarti Binti Isa, tempat dan tanggal lahir Lubuk Gobing, 08 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jorong Lubuk Gobing, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 November 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA TALU dengan di-di pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Minggu tanggal 10 Januari 1988 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Lubuk Gobing, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi w nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Yusron, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh Japar dan Bosman dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak bernama :
  - a. Nursakinah binti Jontar, lahir pada tanggal 29 Desember 1999;
  - b. Amulian bin Jontar, lahir pada tanggal 09 Desember 2001;
  - c. Salsa Mariska binti Jontar, lahir pada tanggal 18 Mei 2004;
  - d. Aprilia Suci Azzahra, lahir pada tanggal 18 April 2013;
6. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jontar bin Adra ) dengan Pemohon II (Yusniarti binti Isa ) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 1988, di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Lubuk Gobing, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan jumlah anak Pemohon I dan Pemohon II sebanyak tujuh orang;

Bahwa untuk membuktikan di-dlnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Ramli bin Melu, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jorong Pasir Panjang, Kenagarian Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah kakak ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa, Pemohon I Menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 1988;
  - Bahwa, saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, saksi melihat ijab kabul antara Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Lubuk Gobing, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat;
  - Bahwa, w nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Yusron, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa, saksi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Japar dan Bosman;
  - Bahwa, mas kawin atau mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat tunai;
  - Bahwa, status Pemohon I dengan Pemohon II saat menikah adalah bujang dan Pemohon II gadis;
  - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semenjak menikah Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam, baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan, maupun beda agama;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Yuslan bin Buhari, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jorong Lubuk Gobing, Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah kakak ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I Menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 1988;
- Bahwa, saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi melihat ijab kabul antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Lubuk Gobing, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa, w nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Yusron, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Japar dan Bosman;
- Bahwa, mas kawin atau mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I dengan Pemohon II saat menikah adalah bujang dan Pemohon II gadis;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa, semenjak menikah Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam, baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan, maupun beda agama;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, *jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan, seperti maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah perkara *aquo* untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya dan untuk persyaratan administrasi lainnya, sudah seharusnya untuk diatasi, maka perkara ini patut dipertimbangkan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang di-dl permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “yang berhak mengajukan permohonan *itsbat nikah* ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, w nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”. Jika dikaitkan dengan perkara *a quo* maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan langsung memohon Pengesahan Nikah untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berwenang dan mempunyai kedudukan hukum sebagai *persona standi in judicio*, maka dari itu perkara *a quo* dapat untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat nikah* antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan karena Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Januari 1988 di Kecamatan Ranah Batahan, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang Pengesahan Nikah tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan;

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah terkait dengan ketentuan huruf (e) Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di atas, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mengg keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut serta telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Ranah Batahan pada tanggal 10 Januari 1988, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon I bernama Yusron, dan saksi-saksi nikahnya adalah Japar dan Bosman dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta, yakni:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 1988 di Kecamatan Ranah Batahan, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon I bernama Yusron dan saksi-saksi nikahnya adalah Japar dan Bosman dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa, saat pernikahan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik itu karena hubungan nasab, hubungan sesusuan, ataupun hubungan persemendaan, dan tidak pula ada halangan menurut adat setempat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keperluan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya adalah untuk mendapatkan bukti otentik dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, pada tanggal 10 Januari 1988 dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa mengenai tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di KUA berwenang, Majelis Hakim menilai bahwa tidak terbukti adanya unsur penipuan dan atau manipulasi oleh para Pemohon. Oleh karena itu, permohonan penetapan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi "*Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)*";

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim mengemukakan keterangan dalam Kitab Tuhfah jilid IV halaman 133 yang juga diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالتَّكَاحِ

Artinya : "*Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil bgh*".

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 461 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA TALU





وَلَوْ قَالَ الرَّجُلُ فَلَا تَهْ رَوْجَتِي وَلَمْ يُقْصَلْ وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْءَةُ أَوْ  
الْمُجْبِرُ كَفَى

Artinya: “Apabila seorang laki-laki berkata, “Fulanah istriku”, dan ia tidak memerinci dan istri membetulkan kepada kata-kata lelaki itu, atau w mujbir, maka telah dianggap cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan Kecamatan Ranah Batahan, pada tanggal 10 Januari 1988 patut untuk disahkan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tiap- tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Batahan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu berdasarkan penetapan ini dan kepada para Pemohon tersebut supaya diberikan kutipannya sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 jo. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA TALU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jontar bin Adra**) dengan Pemohon II (**Yusniarti binti Isa**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1988, di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Rinaldi. M, S.HI dan A. Wafi, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FITHRAH, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Rinaldi. M, S.HI  
Hakim Anggota,

H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I

dto

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA TALU



A. Wafi, SHI

Panitera Pengganti,  
dto

FITHRAH, SHI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 270.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp366.000,00</b>

( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Salinan penetapan sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

Harmen, S.Ag